



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SISFOTEK (Sistem Informasi dan Teknologi)

Padang, 4–5 September 2018

ISSN Media Elektronik 2597-3584

Pemodelan *Value* Layanan Informasi Industri dan Perdagangan dengan Metode TOGAF

Indri Koesnadi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
i_koesnadi@yahoo.com

Abstract

Public value was a goal to be achieved by public service providers. Currently, public satisfaction with public service providers is still very limited. The scope of information services mostly focus on information dissemination. Value, ideally becomes the basis for modeling a public information service. That was influenced by community character and technical character. The public value approach was useful for increased trust and satisfaction with the delivery of public services. Department of Industry and Trade of West Java Province which has been the organizer of industry and trade affairs at Provincial level become the case study in Value Modeling of Information Service of Industry and Trade with TOGAF Method. The modeling was present in operational governance, operational technical services, process modeling and data modeling to improving the building block and metamodel formulation. That was an effort to improve the quality of information services. Through the modeling was expected to produce transparent information and open the space of collaboration with public participation so as to create the achievement of the public value that has been set in the planning documents.

Keywords: *value, information services, public value*

Abstrak

Public value merupakan tujuan yang akan dicapai oleh penyelenggara layanan publik. Saat ini, kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi penyelenggara layanan publik masih sangat terbatas. Ruang lingkup layanan informasi kebanyakan fokus pada diseminasi informasi. *Value* idealnya menjadi dasar dalam melakukan pemodelan sebuah layanan informasi publik yang dipengaruhi oleh karakter masyarakat dan karakter teknis. Pendekatan *public value* bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang merupakan penyelenggara urusan industri dan perdagangan di tingkat Provinsi menjadi tempat studi kasus dalam Pemodelan *Value* Layanan Informasi Industri dan Perdagangan dengan Metode TOGAF. Pemodelan tersebut dituangkan dalam tata kelola operasional, layanan teknis operasional, pemodelan proses dan pemodelan data yang mendasari rumusan *building block* dan metamodel sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi. Melalui pemodelan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan informasi yang transparan dan membuka ruang kolaborasi serta partisipasi publik sehingga menciptakan pencapaian terhadap *public value* yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan instansi.

Kata kunci: *value, layanan informasi, public value*

© 2018 Prosiding SISFOTEK

1. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional [1]. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Instansi Pemerintah sebagai badan publik berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan

sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola dan menghasilkan informasi. *Public value* dapat didefinisikan sebagai prinsip pengorganisasian yang memberikan fokus kepada pegawai sebagai individu yang bebas untuk mengejar dan mengusulkan ide-ide baru tentang bagaimana untuk meningkatkan kerja organisasi, dalam hal efisiensi atau jasa.

Pada umumnya, organisasi publik telah memiliki dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang dijadikan sebagai

acuan dalam penyelenggaraan urusan yang ditangani. Didalamnya terdapat arah bisnis yang dijalankan, upaya bisnis yang akan dilakukan, kerangka operasional dalam menjalankan upaya bisnis tersebut, sasaran yang hendak dicapai yang tercermin pada indikator dan target kinerja dari bisnis yang dijalankan termasuk *public value* yang akan dicapai.

Bukti keberhasilan kinerja dapat dilihat dari kepuasan masyarakat sebagai pengguna data/informasi terhadap kinerja layanan informasi publik pada badan publik. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa respon instansi pemerintah terhadap kebutuhan informasi masyarakatnya cenderung lambat. Oleh karenanya bisa dipahami apabila kepuasan terhadap layanan publik instansi pemerintah masih sangat terbatas.

Pemodelan *Value Layanan Informasi Industri dan Perdagangan* dengan Metode TOGAF mengambil study kasus di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Pendekatan *Public Value* digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memproses layanan informasi, mengukur pencapaian *public value* melalui layanan informasi publik dan menciptakan model layanan informasi berbasis *value* dengan menggunakan TOGAF.

2. Tinjauan Pustaka

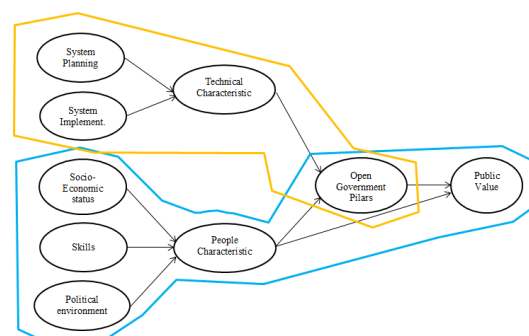
Public value merupakan hasil mengartikulasikan visi atau arah bisnis terhadap nilai publik yang mendapatkan legitimasi dan dukungan dan operasional dalam pelaksanaan domain tanggung jawab yang dimiliki [2]. *Public value* tercipta akibat irisan antara 3 (tiga) elemen dasar yaitu pelaksanaan program, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dan investasi terhadap teknologi [3]. Penciptaan *Public value* dipengaruhi 2 (dua) karakteristik dalam pelaksanaannya yaitu karakteristik teknikal (*technical characteristics*) dan karakteristik manusia (*people characteristic*).

Pengembangan teknologi *open government*, dan *electronic government* meningkatkan akses informasi publik. Penerapan *open government* dan *electronic government* menggunakan pendekatan transparansi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan perangkat teknologi informasi yang memungkinkan sistem informasi yang saling terkoneksi membuat pendekatan partisipasi, kolaborasi dan inovasi menjadi pendekatan terkini terkait penerapan *open government* [4]. Di Indonesia, pelaksanaan *open government* dikukuhkan dengan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejak undang-undang keterbukaan informasi publik diterbitkan, masyarakat Indonesia semakin antusias mencari informasi publik di instansi-instansi pemerintah. Atas keterbukaan informasi tersebut, pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik semakin dimudahkan.

Dalam suatu organisasi, transformasi data dilakukan untuk menjadikan informasi sesuai dengan tujuan organisasi. Informasi diklasifikasikan dan disusun dengan memperhatikan nilai penting dan kritikalitas informasi bagi penyelenggaraan layanan, baik yang dihasilkan secara internal maupun diterima dari pihak eksternal. COBIT menyebutkan bahwa kriteria informasi terbagi atas 7 (tujuh) aspek utama [5] sebagai berikut :

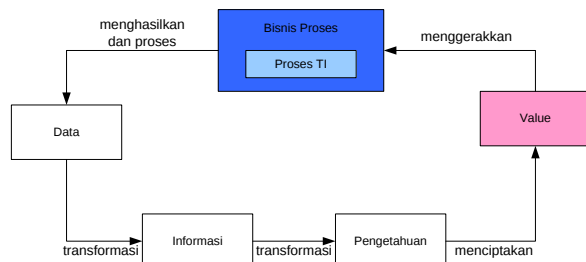
- [1]. *Effectiveness*, berarti informasi relevan dan dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis. Tersedia secara tepat waktu, akurat, konsisten dan dapat dengan mudah digunakan.
- [2]. *Efficiency*, berarti informasi menggunakan sumber daya secara produktif dan ekonomis.
- [3]. *Confidentially*, berarti informasi bersifat aman dari pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya.
- [4]. *Integrity*, berarti informasi berhubungan secara tepat dan lengkap.
- [5]. *Avalilability*, berarti informasi tersedia secara cepat ketika dibutuhkan.
- [6]. *Compliance*, berarti informasi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- [7]. *Reliability*, berarti informasi terjamin keandalannya.

Untuk membuat data yang transparan dan membuka ruang kolaborasi dan partisipasi publik, diciptakan *public value* sebagai nilai-nilai yang akan dicapai. Perspektif *special issue* mengungkapkan bahwa teori *open government* dan *value creation* seperti terlihat pada Gambar 1. Pada gambar tersebut terlihat bahwa terdapat dua karakteristik yang merupakan bagian dari *open government* dalam menciptakan *public value* terdiri dari karakteristik teknik dan karakteristik manusia (*people characteristics*). Karakter teknis berguna sebagai pendekatan secara kesisteman.



Gambar 1. Teori *Open government* dan *Value Creation* from special issue perspective

Pada pendekatan kesisteman, data, informasi dan *value* bagaikan sebuah siklus informasi. Pada siklus informasi proses bisnis menghasilkan dan mengolah data, mentransformasikannya menjadi informasi dan pengetahuan, akhirnya menciptakan nilai bagi organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Siklus Informasi

Untuk mengukur pencapaian *public value* oleh *stakeholders* dilakukan evaluasi terhadap layanan informasi yang ditinjau dari *people* dan *technology*. Variabel-variabel dari elemen *people* digambarkan sebagai indikator kinerja yang meliputi perilaku organisasi, budaya organisasi, asset organisasi dan kompetensi dasar. Sementara variabel-variabel dari elemen *technology* digambarkan sebagai indikator kinerja seperti standar, layanan, *service level management* dan *quality of service* [6].

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, model pencantuman predikat hasil evaluasi diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan indikator yang dievaluasi berdasarkan rata-rata capaian indikator masing-masing penilaian. Skala nilai peringkat tersebut sebagaimana dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala Intensitas

No	Interval Nilai Penilaian (%)	Kriteria Penilaian
1	91 – 100	Sangat Tinggi
2	76 – 90	Tinggi
3	66 – 75	Sedang
4	51 – 65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Salah satu metodologi untuk pengembangan arsitektur dalam *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF) disebut *Architecture Development Method* (ADM) [7]. Tahapan yang digunakan dalam desain mengikuti tahapan dalam TOGAF ADM dengan fokus pada desain Arsitektur Visi, Arsitektur Bisnis dan Arsitektur Sistem Informasi.

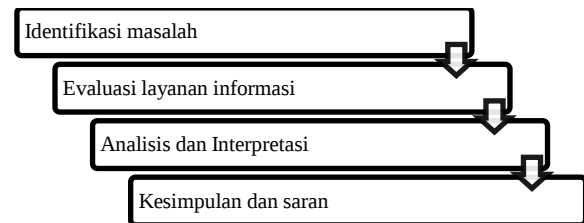
3. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan Pemodelan *Value* Layanan Informasi Industri dan Perdagangan dengan Metode TOGAF dilakukan tahapan sebagai berikut :

- [1]. identifikasi masalah, melakukan penajaman masalah dan mengelompokkan masalah berdasarkan kriteria tertentu;
- [2]. evaluasi, dilakukan melalui survey dengan cara mendistribusikan kuesioner;

- [3]. analisis dan interpretasi, melakukan analisis dan interpretasi berupa desain layanan dari hasil kuesioner dan studi literatur yang dilakukan;
- [4]. kesimpulan, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data.

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dengan siklus proses dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Metode Penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Value Industri dan Perdagangan di Jawa Barat

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri [8]. Sementara, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi [9]. Penyelenggaraan urusan industri dan perdagangan menjadi urusan pilihan [10]. Urusan pilihan berarti urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Keterkaitan urusan industri dan perdagangan sangat erat, dimana pada perdagangan dilakukan transaksi barang/jasa termasuk hasil kegiatan industri. Digabungnya urusan industri dan perdagangan dalam 1 (satu) institusi publik penyelenggara negara diharapkan dapat menghasilkan penyelenggaraan industri dan perdagangan mulai dari hulu sampai dengan hilir secara terpadu dan terintegrasi.

Jawa Barat dalam menangani urusan industri dan perdagangan digabung dalam 1 institusi. Adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi penanganan industri dan perdagangan. *Public value* yang ditetapkan adalah daya saing berdasarkan transparansi. Daya saing yang dimaksud dapat berarti ‘Berdaya saing’ dan atau ‘mewujudkan daya saing. Berdaya saing berarti kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk dapat tumbuh (berkembang) dengan kemampuan tinggi di antara persaingan industri dan perdagangan untuk menjadi lebih unggul. Mewujudkan daya saing berarti lebih memusatkan perhatian untuk merebut pasar dengan harga yang lebih bersaing

melalui efisiensi biaya produksi; memanfaatkan kekhasan model atau kualitas terbaik yang tidak terdapat pada pihak lain lain sehingga menarik pembeli; memusatkan perhatian (fokus) pada segmen pasar tertentu dan dengan menggunakan kombinasi dari kemampuan yang dimiliki [11].

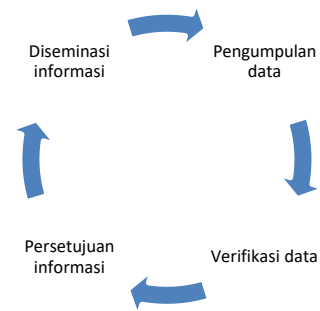
4.2 Pengukuran Kepuasan Masyarakat

Transparansi berarti suatu proses keterbukaan dari manajemen, utamanya manajemen publik untuk membangun akses dalam proses pengelolaan informasi keluar dan masuk secara berimbang. *Public value* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tersebut dengan jelas telah memberikan peran kepada informasi menjadi salah satu faktor dari nilai-nilai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat telah memiliki website yang berfungsi sebagai media layanan informasi yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara transparan. Akan tetapi, benarkah demikian?

Pengukuran terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan dilakukan melalui tahap selanjutnya, evaluasi. Evaluasi Layanan Informasi Publik dilakukan untuk menilai keberhasilan layanan informasi publik yang di tinjau dari *people* dan *technology*. Variabel-variabel dari elemen *people* sebagai indikator kinerja seperti perilaku organisasi, budaya organisasi, asset organisasi dan kompetensi dasar. Sementara variabel-variabel dari elemen *technology* sebagai indikator kinerja seperti standar, layanan, *service level management* dan *quality of service*.

Stakeholders yang merupakan pengguna informasi secara luas yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yaitu mewakili kalangan Pemerintahan, Instansi Swasta dan Masyarakat luas. Seluruh informasi pada media layanan dianggap telah melalui tahapan pengumpulan data, verifikasi data, persetujuan informasi oleh pemilik informasi dan diseminasi informasi. Seluruh tahapan menjadi siklus dalam penerbitan informasi dalam layanan yang diberikan. Siklus tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Pengumpulan data pada evaluasi layanan informasi menggunakan kuesioner berdasarkan kebutuhan informasi masyarakat terhadap Dinas dan penilaian terhadap layanan informasi berbasis website. Model pencantuman predikat hasil evaluasi diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kriteria yang dievaluasi berdasarkan rata-rata capaian kriteria masing-masing penilaian. Skala nilai peringkat tersebut sebagaimana dilihat pada Tabel 1.



Gambar 4. Siklus Penerbitan Informasi dalam Layanan

Evaluasi terhadap layanan informasi yang diberikan ditinjau dari perspektif *people* dan *technology*. Layanan informasi harus memenuhi aspek utama informasi. Identifikasi permasalahan dilakukan untuk menentukan kriteria dalam penilaian evaluasi kebutuhan informasi para *stakeholders* industri dan perdagangan. Kriteria ini sekaligus merupakan kriteria sasaran untuk dinilai. Selengkapnya pemetaan aspek utama informasi terhadap kriteria penilaian evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan aspek utama informasi terhadap criteria penilaian evaluasi

No	Perspektif	Aspek Utama	Kriteria
1	<i>People</i>	<i>Efficiency</i>	Pengetahuan ketersediaan informasi publik
2	<i>People</i>	<i>Efficiency</i>	Upaya masyarakat untuk mencari informasi
3	<i>People</i>	<i>Effectiveness</i>	Kebutuhan informasi bagi masyarakat
4	<i>People</i>	<i>Effectiveness</i>	Sumber layanan informasi yang diterima
5	<i>People</i>	<i>Avalilability</i>	Lama waktu mendapatkan informasi
6	<i>People</i>	<i>Avalilability</i>	Jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat
7	<i>Technology</i>	<i>Integrity</i>	Kelengkapan informasi yang diterima
8	<i>Technology</i>	<i>Confidentially</i>	Prosedur mendapatkan informasi
9	<i>Technology</i>	<i>Compliance</i>	Pemanfaatan teknologi informasi terhadap informasi
10	<i>Technology</i>	<i>Reliability</i>	Kebutuhan informasi dengan menggunakan teknologi informasi

Hasil pengumpulan data tentang evaluasi layanan informasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengumpulan Data

No	Kriteria	Predikat
1	Pengetahuan ketersediaan informasi publik	Rendah
2	Kebutuhan informasi bagi masyarakat	Sangat tinggi
3	Upaya masyarakat untuk mencari	Sedang

4	informasi Sumber layanan informasi yang diterima	Sedang
5	Lama waktu mendapatkan informasi	Rendah
6	Jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat	Rendah
7	Kelengkapan informasi yang diterima	Rendah
8	Prosedur mendapatkan informasi	Sedang
9	Penilaian masyarakat tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap informasi	Sangat Rendah
10	Kebutuhan informasi dengan menggunakan teknologi informasi	Tinggi

Hasil survey evaluasi layanan informasi menyebutkan bahwa layanan informasi dinilai Rendah. Hal ini tercermin dari :

- [1]. Pengetahuan ketersediaan informasi publik yang rendah sementara kebutuhan informasi yang sangat tinggi;
- [2]. Waktu mendapatkan informasi yang lebih dari 1 hari;
- [3]. Ketersediaan jenis informasi baik itu yang bersifat layanan maupun dokumentasi kelengkapan layanan informasi yang diterima masyarakat yang kurang;
- [4]. Pemanfaatan teknologi informasi yang masih parsial.

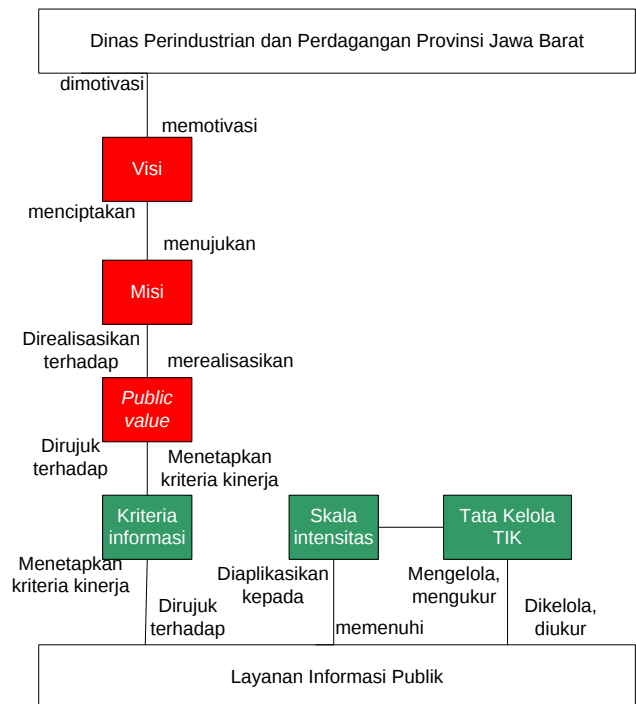
4.3 Model Informasi Terpadu

Dalam rangka peningkatan kualitas dan integritas data, sistem informasi industri dan perdagangan terpadu berbasis internet dapat menjadi *backoffice* dari layanan informasi publik karena didalamnya telah terjadi konektivitas fisik (*physical connectivity*), institusi (*institutional connectivity*) dan antar masyarakat (*people to people connectivity*). Konektivitas diharapkan akan mampu memperkuat *supply chain* dan sekaligus memajukan bisnis (perdagangan). Sistem Informasi Industri dan Perdagangan terpadu merupakan media keterhubungan antara *supplier*, yang menjadi *input*, dan *customer*, yang menjadi *output* [12]. Terdefinisi sebagai *supplier* adalah Pelaku usaha industri, pedagang dan partner lain atau melakukan PRM (*partner relationship management*). PRM ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ataupun hasil dari proses pelelangan pengadaan barang/jasa. Terdefinisi sebagai *customer* adalah pelaku usaha industri, pedagang, partner lain dan calon wirausaha baru. Penyelenggara industri dan perdagangan melakukan PRM (*partner relationship management*) dan CRM (*customer relationship management*). *Customer* utamanya calon wirausaha baru diharapkan senantiasa melakukan eksplorasi melalui pembelajaran secara elektronik atau *e-learning*. Selengkapnya tentang model sistem informasi industri dan perdagangan terpadu dapat dilihat pada lampiran. Selanjutnya, disusun tata kelola operasional

yang difokuskan pada pembentukan visi, misi, kriteria layanan dan standar layanan yang akan digunakan.

4.4 Pemodelan Value Layanan Informasi

Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat diwujudkan dalam *public value* yaitu transparansi. Kriteria informasi menjadi rujukan pada layanan informasi publik. Skala intensitas disusun untuk diaplikasikan pada layanan informasi publik yang pengelolaannya mengacu kepada Tata Kelola TIK. Selengkapnya, tata kelola operasional dapat dilihat pada Gambar 5.



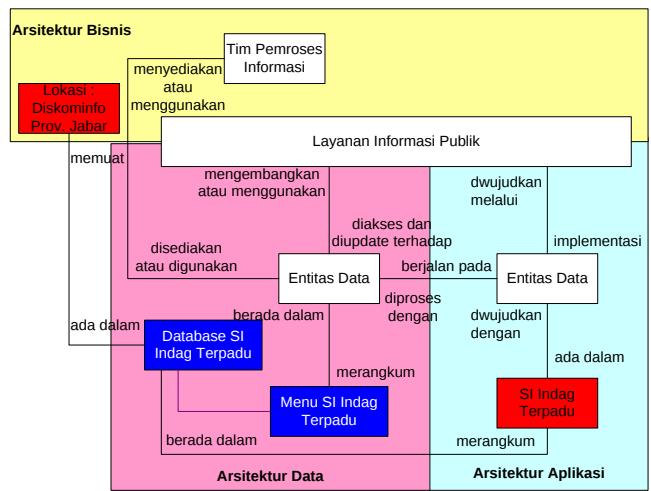
Gambar 5. Tata Kelola Operasional

Layanan informasi publik diciptakan untuk mengintegrasikan sasaran strategik dan layanan teknik operasional. Layanan tersebut merupakan media interaksi yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholders*. Pendefinisian integrasi antara sasaran strategik dan layanan teknis operasional dapat dilihat pada Gambar 6.

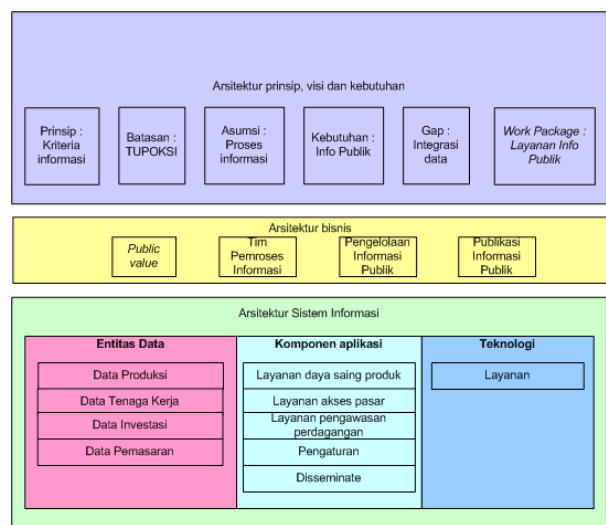
Setelah memperoleh definisi aplikasi, selanjutnya adalah melakukan pemodelan arus proses secara rinci. Pemodelan arus proses termasuk dalam arsitektur bisnis. Pemodelan tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.

Setelah pemodelan proses selesai disusun, selanjutnya adalah pemodelan data. Pemodelan data menggambarkan tentang entitas data beserta komponennya sehingga dapat dikelola dalam aplikasi.

Selengkapnya, pemodelan data dapat dilihat pada Gambar 8.

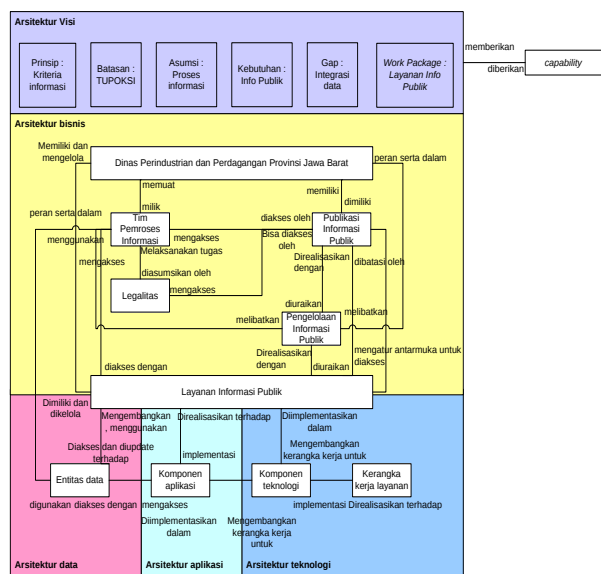


Gambar 8. Pemodelan Data

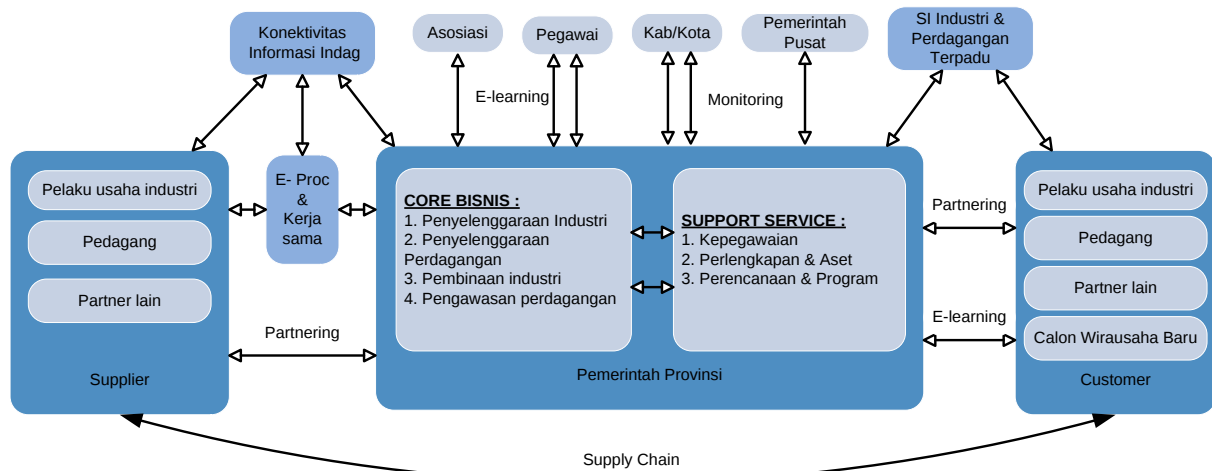


Gambar 7. Pemodelan Proses

Metamodel merupakan turunan dari kerangka kerja arsitektur sesuai dengan *building block*. Selengkapnya metamodel Layanan Informasi Publik bidang industri dan perdagangan dapat dilihat pada Gambar 10.



PROSIDING SISFOTEK (Sistem Informasi dan Teknologi) 2018



5. Kesimpulan

Kesimpulan terdiri atas simpulan dan saran atas hasil penelitian.

5.1 Simpulan

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik diperlukan Pemodelan *Value* Layanan Informasi Industri dan Perdagangan dengan Metode TOGAF. Pemodelan tersebut akan menggambarkan konten serta keselarasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tata kelola operasional, layanan operasional, pemodelan proses dan pemodelan data merupakan pembentuk *building block* dan metamodel Layanan Informasi.

5.2 Saran

Untuk mencapai *Value* Layanan Informasi Industri dan Perdagangan, agar model tersebut dapat diimplementasikan secara bertahap dan terstruktur untuk selanjutnya dilakukan penilaian kualitas informasi yang dihasilkan.

Daftar Rujukan

- [1] _____, 2008. *Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- [2] Mark H. Moore, 1995. *Creating Public value Strategic Management in Government*, Cambridge, Mass : Harvard University Press.
- [3] Cresswell, Anthony M., G. Brian Burke dan Theresa A. Pardo, 2006. *Advancing Return on Investment Analysis for Government IT : Public value Framework*. White paper. p 1-32.
- [4] Reyes, Luis F Luna dan Soon Ae Chun, 2012. *Open government and Publik Participation: Issues and Challenge in Creating Public value*. IOS Press, Information Policy 17. p 77-81.
- [5] _____, 2012. *COBIT 5, A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT*, ISACA, USA.

- [6] Sembiring, Jaka; Nuryatno, Edi Triono; n Gondokaryono, Yudi Satria, 2011. *Analyzing the Indicators and requirements in Main Components of Enterprise Architecture Methodology Development Using Grounded Theory in Qualitative Methods*., Journal Econometrics: Econometric & Statistical Methods – Special Topics e-Journal, vol. 4, no. 48.
- [7] _____, 2009. *The Open Group Architecture Framework (TOGAF)*, USA
- [8] _____, 2014. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*.
- [9] _____, 2014. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*.
- [10] _____, 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- [11] . _____, 2013. *Rencana Stretegis Tahun 2013 – 2018*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- [12] Koesnadi, Indri, 2016. *Arsitektur Informasi Penyelenggaraan Urusan Industri dan Perdagangan Pemerintah Provinsi, SRITI 2016*.